

## DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen teknis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Darumurti, S.H., M.H., Dr. Krishna Djaya. 2016. *Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postscript dan Apendik*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Hasbi Umar. 2008. *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPD*. *Innovatio*, Vol. VII No. 14:315.

Lutfil Ansori. 2015. *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*. *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 1:134-150.

Sarbaini, S.H., M.H.. 2015. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII No. 1:112

Rida Farida. 2015. *Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2:372.

Admin KPU. 2015. *Menakar Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak*. Diambil dari : <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3980/Menakar-Peluang-dan-Tantangan-Pilkada-Serentak/berita-kpu-daerah> . Diunduh pada 10 Juni 2016.

Admin KPU. 2015. *KPU Optimis Pilkada Serentak 9 Desember 2015*. Diambil dari : <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3964/KPU-Optimis-Pilkada-Serentak-9-Desember-2015/berita> . Diunduh pada 10 Juni 2016.

Bestari News. 2015. *Sani-Nurdin Menang Dalam Perolehan Suara Pilgub Kepri*. Diambil dari : <http://www.bestarnews.com/index.php/2015/12/18/sani-nurdin-menang-dalam-perolehan-suara-pilgub-kepri/> . Diunduh pada 10 Juni 2016.

Humas Kepriprov. 2016. *Sani-Nurdin Dilantik Oleh Presiden*. Diambil dari : <http://www.kepriprov.go.id/index.php/138-berita/1805-sani-nurdin-dilantik-oleh-presiden> . Diunduh 11 Juni 2016.

Melisa. 2016. *Usai Rapat di Istana Negara, Gubernur Kepri HM Sani Meninggal Dunia*. Diambil dari : <http://www.inddit.com/f-6j97ze/usai-rapat-di-istana-negara-gubernur-kepri-hm-sani-meninggal-dunia> . Diunduh 11 Juni 2016.

Wikipedia. *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Diambil dari : [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia) . Diunduh pada 29 Juli 2016.

Pusat Penerangan Depdagri. 2006. *Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Kepala*

*Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh Direktur Jenderalotonomi Daerah*

*Departemen Dalam Negeri*. Diambil dari :

<http://www.kemendagri.go.id/news/2006/05/05/tatacara-dan-mekanisme->

[pemilihan-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-oleh-direktur-](http://www.kemendagri.go.id/news/2006/05/05/tatacara-dan-mekanisme-)

[jenderalotonomi-daerah-departemen-dalam-negeri](http://www.kemendagri.go.id/news/2006/05/05/tatacara-dan-mekanisme-) . Diunduh pada 1

Agustus 2016.

Admin Kajian Komunikasi Politik. 2013. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*

*(Pilkada)*. Diambil dari :

<http://kajianpolitikunningan.blogspot.co.id/2013/06/pemilihan-kepala->

[daerah-langsung.html#](http://kajianpolitikunningan.blogspot.co.id/2013/06/pemilihan-kepala-) . Diunduh pada 10 Agustus 2016.

Admin Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2016. *Jadi UU No. 10 Tahun*

*2016, Presiden Jokowi Sudah Sahkan UU Pilkada*. Diambil dari :

<http://setkab.go.id/jadi-uu-no-10-tahun-2016-presiden-jokowi-sudah->

[sahkan-uu-pilkada/](http://setkab.go.id/jadi-uu-no-10-tahun-2016-presiden-jokowi-sudah-) . Diunduh pada 14 Januari 2017.

Admin Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2016. *Inilah PP Tentang*

*Pengusulan dan Pengangkatan Wagub, Wabup, dan Wakil Walikota*.

Diambil dari : <http://setkab.go.id/inilah-pp-tentang-pengusulan-dan->

[pengangkatan-wagub-wabup-dan-wakil-walikota/](http://setkab.go.id/inilah-pp-tentang-pengusulan-dan-) . Di unduh pada tanggal

14 Januari 2107.

Mulyana Massmoel. 2013. *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah*

*yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan Berdasarkan Peraturan*

*Perundang-Undangan*?. Diambil dari :  
<http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/2424> . Diunduh pada 15  
 Agustus 2016.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2014. *UU No. 30/2014: Inilah Hak,  
 Kewajiban, dan Diskresi Pejabat Pemerintahan*. Diambil dari :  
[http://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-  
 pejabat-pemerintahan/](http://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/) . Diakses pada 14 Januari 2017.

Sangkoeno. 2015. *Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Perspektif  
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8  
 Tahun 2015*. Diambil dari :  
[http://www.sangkoeno.com/2015/11/pengisian-jabatan-wakil-kepala-  
 daerah.html?m=1](http://www.sangkoeno.com/2015/11/pengisian-jabatan-wakil-kepala-daerah.html?m=1) . Diunduh pada tanggal 15 September 2016.

Charles Sitompul. 2105. *Sani-Nurdin Sah Jadi Gubernur Kepri Terpilih Hasil  
 Pilkada 2015*. Diambil dari : [http://batam.batamtoday.com/berita66610-  
 Sani-Nurdin-Sah-Jadi-Gubernur-Kepri-Terpilih-Hasil-Pilkada-2015.html](http://batam.batamtoday.com/berita66610-Sani-Nurdin-Sah-Jadi-Gubernur-Kepri-Terpilih-Hasil-Pilkada-2015.html) .  
 Diunduh pada tanggal 15 September 2016.

Hukum Online.com. 2014. *Tata Cara Penggantian Jika Penggantian Kepala  
 Daerah Dan Wakilnya Berhalangan Tetap*. Diambil dari :  
[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dbe81ce35e9/tata-cara-  
 penggantian-jika-kepala-daerah-dan-wakilnya-berhalangan-tetap](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dbe81ce35e9/tata-cara-penggantian-jika-kepala-daerah-dan-wakilnya-berhalangan-tetap) .  
 Diunduh pada 15 September 2016.

Nur. 2016. *Nurdin Jadi Plt Gubernur, Kursi Wagub Kosong, Ini Mekanisme Pergantiannya*. Diambil dari : <http://batampos.co.id/2016/05/02/sani-harus-diberhentikan-lewat-paripurna-dprd/> . Diunduh pada 15 September 2016.\

Batam Pos. 2016. *Mendagri Beri Waktu 1,5 Bulan untuk Pilih Wagub Kepri*. Diambil dari : <http://batampos.co.id/2016/09/03/mendagri-beri-waktu-15-bulan-pilih-wagub-kepri/>. Diunduh pada 24 Januari 2017.

Haluan Kepri. 2016. *Menanti Wagub Kepri Terpilih*. Diambil dari : <http://haluankepri.com/rubrik/opini/95905-menanti-wagub-kepri-terpilih.html>, Diunduh pada 24 Januari 2017.

Jurnal Investigasi. 2017. *Wagub Kepri Kosong, Pembangunan dan Pelayanan Publik Pemerintah Kepri Stagnan*. Diambil dari : <http://www.jurnalinvestigasi.com/2017/01/15/wagub-kepri-kosong-pembangunan-dan-pelayanan-publik-stagnan/>, Diunduh pada 24 Januari 2017.

Politik Today. 2015. *Komisi II DPR-RI Desak DPRD Kepri Segera Pilih Wagub*. Diambil dari : <http://politiktoday.com/komisi-ii-dpr-ri-desak-dprd-kepri-segera-pilih-wagub/>, Diunduh pada 24 Januari 2017.

Batam Today. 2016. *LAM Batam Minta Pengisian Wagub Kepri Disegerakan*. Diambil dari : <http://www.batamtoday.com/berita-77936-LAM-Batam-Minta-Pengisian-Wagub-Kepri-Disegerakan.html>, Diunduh pada 25 Januari 2017.

Batam Today. 2016. *Kemendagri Surati Gubernur Kepri Agar Fasilitai Pengisian*

*Wagub.* Diambil dari : <http://www.batamtoday.com/berita-75371-Kemendagri-Surati-Gubernur-Kepri-agar-Segera-Fasilitasi-Pengisian-Wagub.html>, Diunduh pada 25 Januari 2017.

Batam Today. 2016. *Bahas Calon Wagub, Nurdin Bertemu Dengan Partai*

*Pengusung.* Diambil dari : <http://www.batamtoday.com/berita-83143-Bahas-Calon-Wagub,-Nurdin-Bertemu-dengan-Partai-Pengusung.html>, Diunduh pada 25 Januari 2017.

Batam Pos. 2016. *Kepri Nurdin Jadi Plt Gubernur, Kursi Wagub Kosong, Ini*

*Mekanisme Pergantiannya.* Diambil dari : <http://batampos.co.id/2016/05/02/sani-harus-diberhentikan-lewat-paripurna-dprd/> . Diunduh pada 26 Januari 2017.

Haluan Kepri. 2016. *Pemilihan Wagub Terbentur PP.* diambil dari :

<http://www.haluankepri.com/batam/95529-pemilihan-wagub-terbentur-pp.html>, Diunduh pada tanggal 13 Februari 2017.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005.

Indonesia, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2014  
Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil  
Bupati, Dan Wakil Walikota.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum  
Presiden Dan Wakil Presiden.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan  
Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati, Dan Walikota.

Indonesia, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan  
Walikota.

Indonesia, PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian, Dan Pengangkatan  
Pejabat Kepala Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara.